

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD ZIHAR MUBARAQ

E051 201 038



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KAB. JENEPONTO

Yang disusun dan diajukan oleh:

Ahmad Zihar Mubaraq

E051 201 038

Yang telah dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.

NIP. 19570707 1984 03 1 005

Irwan Ade Saputra, S.IP, M.Si.

NIP. 19960403 2022 04 3 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991 01 1 001



LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JENEPONTO

Dipersiapkan dan disusun oleh :

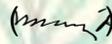
Ahmad Zihar Mubaraq

E051 201 038

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2023

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.	()
Sekretaris	: Irwan Ade Saputra, S.IP,M.Si.	()
Anggota	: Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.	()
Anggota	: Dr. Suhardiman Syamsyu, M.Si.	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.	()
Pembimbing Pendamping	: Irwan Ade Saputra, S.IP,M.Si.	()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zihar Mubaraq

NIM : E051201038

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI KAB. JENEPONTO

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 April 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Zihar Mubaraq



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Program studi Ilmu Pemerintahan, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.



4. Bapak Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi, serta melibatkan saya dalam beberapa kegiatan beliau untuk menambah pengalaman.
5. Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP,M.Si. selaku dosen sekaligus pembimbing II, yang selalu memberikan dorongan, arahan, bimbingan, dan motivasi dalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
8. Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Sosial serta Kepala Bappeda dan seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Jeneponto yang sudah membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.
9. Orang tua penulis, Ayahanda Suwardi dan Ibunda Nurlaelah sosok tiada duanya yang berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa mendoakan, serta memberi nasehat, semangat, motivasi dan dorongan baik itu secara moral maupun materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dengan baik.



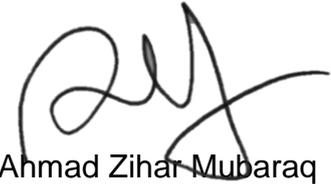
10. Kepada seluruh sanak saudara serta keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
11. Kepada orang terkasih penulis, Amalia yang selalu menemani dan memberikan harapan, semangat, dan kegembiraan dalam hidup penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini dengan penuh kenangan yang sulit untuk dilupakan.
12. Teman-teman LAKANAS yang selalu memberikan hiburan dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
13. Teman-teman UKM SB Fisip UH, yang telah memberikan tempat pelepas jenuh dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Teman-teman Panitia Makrab/Nack Ilpem/Es Teh/Nosiasi yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman angkatan 2020 jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
16. Teman-teman KKNT Pengembangan UMKM Bantaeng Gelombang 110 Posko 4 Desa Bonto Tallasa beserta bapak dan ibu posko yang selalu menyemangati penulis dan berbagi ilmu serta pengalaman selama melaksanakan KKN.



an semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan karya ilmiah ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin

Makassar, 2 April 2024



Ahmad Zihar Mubaraq



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	II
LEMBAR PENERIMAAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
ABSTRAK	XIII
ABSTRACT.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Peran Pemerintah Daerah	17
2.1.1. Definisi Peran	17
2.1.2. Konsep Pemerintah Daerah.....	21
2.1.3. Peran Pemerintah Daerah	29
2.2. Penanggulangan Kemiskinan	33
2.2.1. Definisi Kemiskinan	33
2.2.2. Penyebab Kemiskinan	40
2.2.3. Indikator indikator Kemiskinan	42
2.2.4. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan	45
2.2.5. Definisi Penanggulangan Kemiskinan	47
2.2.6. Teori Penanggulangan Kemiskinan	52
2.3. Kerangka Konseptual.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
Lokasi dan Waktu Penelitian.....	57
Tipe Dasar Penelitian.....	58
Informan Penelitian	59
	ix



3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.6. Sumber Data.....	62
3.7. Fokus Penelitian	63
3.7.1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan	64
3.7.2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto	65
3.7.3. Gambaran Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.....	67
3.7.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jeneponto.....	68
3.8. Analisis Data.....	71
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	73
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto	73
4.1.2. Gambaran Umum Kondisi Kemiskinan Daerah Kabupaten Jeneponto.....	86
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	93
4.2.1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Sebagai Regulator	94
4.2.2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator.....	111
4.2.3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator	123
4.3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto	128
4.3.1. Faktor Pendukung	129
4.3.2. Faktor Penghambat	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	139
5.1. KESIMPULAN.....	139
5.2. SARAN.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	151



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prsentase penduduk miskin (p0) menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (persen), 2020-2022	11
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto ..	78
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.....	79
Tabel 4.3. Program Penanganan Kemiskinan (2017-2020).....	110
Table 4.4 Indikator Kinerja Utama Beserta Target Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022	121
Table 4.4 Indikator Kinerja Kunci Beserta Target Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2022	122



DAFTAR GAMBAR

Bagan Kerangka Pikir	55
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto	80
Gambar 4.2. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.....	86



ABSTRAK

Ahmad Zihar Mubaraq, Nomor Induk Mahasiswa E051201038, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul : **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jeneponto”**, dibawah bimbingan Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., dan Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Kabupaten Jeneponto. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto jika dilihat dan di ukur melalui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator telah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan terutama pada penguatan anggaran, peningkatan kesadaran masyarakat dan pemuktahiran data kemiskinan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), serta anggaran, sedangkan faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat dan ketidaksesuaian data kemiskinan yang dimiliki.

Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Penanggulangan Kemiskinan, Peran, Dinas Sosial, Kabupaten Jeneponto*



ABSTRACT

Ahmad Zihar Mubaraq, Student Identification Number E051201038, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, is preparing a thesis entitled: "**The Role of Local Government in Poverty Alleviation in Jeneponto District**", under the supervision of Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si., and Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si.

This research aims to examine and analyze the role of local government in poverty alleviation in Jeneponto District as well as the influencing factors. The type of research used is qualitative research. The research location is Jeneponto District. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of the study indicate that the role of local government in poverty alleviation in Jeneponto District, when viewed and measured through the government's role as a regulator, dynamizer, and facilitator, has been quite effective but still needs improvement, especially in budget strengthening, increasing public awareness, and updating poverty data. Meanwhile, the influencing factors consist of supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors are Human Resources (HR) and budget, while inhibiting factors are public awareness and inconsistency in poverty data.

Keywords: *Local Government, Poverty Alleviation, Role, Dinas Sosial, Jeneponto Regency.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang paling mendalam dan menantang di dunia saat ini. Dengan dampaknya yang meresahkan, kemiskinan tidak hanya membatasi akses individu dan komunitas terhadap sumber daya dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan pangan, tetapi juga menghambat perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan adalah gejala multidimensional yang kompleks dan berdampak secara langsung pada tingkat hidup manusia, melampaui sekadar keterbatasan finansial. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemiskinan telah mengalami perluasan makna seiring dengan semakin banyaknya penyebab, indikator yang mengiringinya (Yuliarmi and rka 2014). Tidak hanya pada dimensi ekonomi, kemiskinan merambah kepada berbagai dimensi seperti dimensi sosial,



kesehatan, pendidikan, politik. Jika pada dimensi ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam dimensi politik dapat berupa tidak adanya wadah organisasi yang dapat memperhatikan kaum miskin ataupun pembatasan akses-akses politik, pada dimensi sosial seperti masyarakat miskin tidak terintegrasikan dalam institusi sosial yang ada serta menjamurnya budaya kemiskinan yang terus menerus memperparah kualitas sumber daya manusia dan prinsip kerja masyarakat (Asfi and Wijaya 2015).

Menurut Muhammad Yunus yang dikutip Rafsanjani, H (2017) kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Pendekatan lainnya mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau keluarga yang tidak dapat menggunakan fungsinya di dalam masyarakat.



Berbicara mengenai kemiskinan memang menarik untuk simak dalam berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik.

Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilihan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil. Lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambilan keputusan.(Yulianto, 2005)

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Britha Mikelsen, 2003). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijanto Soegijoko, 1997).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan



kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pada pola waktunya yaitu: (1) *persistent poverty*, merupakan kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi; (2) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya. Ukuran kemiskinan absolut dengan



menggunakan garis kemiskinan atau kondisi kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif dengan membandingkan dengan jumlah keseluruhan kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan menggunakan Gini Ratio untuk mengetahui besarnya kesenjangan.

Strategi Penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia menjelaskan bahwa setiap dekade strategi Penanggulangan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Dalam perspektif Pemerintah itu sendiri Penanggulangan kemiskinan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan daya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang



ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat.

Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan perlu adanya penyamaan indikator dalam hal seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin ataupun berdaya. Sehingga apabila indikator yang digunakan menjadi rujukan bersama akan mempermudah dalam hal penentuan seseorang atau kelompok telah berdaya ataupun tetap miskin. Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi dilakukan oleh BPS sejak tahun 1984. Metode penghitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dimana komponen kebutuhan dasar terdiri dari makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional.

Siagian dalam (Heningtiyas, Sjamsudin and Hadi n.d.) menyampaikan beberapa hal terkait dengan fungsi pemerintahan. Menurutnya pemerintah memiliki lima fungsi yaitu Fungsi Pemeliharaan Ketertiban dan Ketenangan, Fungsi Pertahanan dan Keamanan, Fungsi Perpajakan, Fungsi Hukum, dan Fungsi administratif. Pemerintah merupakan subyek terpenting dalam hal penanggulangan masalah kemiskinan karena kewajiban itu termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia tahun 1945. Salah satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah tentang penanganan kemiskinan adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011.

Selain dari pada itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, membentuk suatu lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dari tingkat nasional hingga kepada tingkat kabupaten kota. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga memiliki lembaga yang berada di daerah yaitu Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan, berada di Antara Kabupaten Takalar dan Bantaeng. Wilayah ini, meskipun memiliki potensi alam dan sumber daya, namun terbatas dalam akses terhadap lapangan pekerjaan yang memadai, hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan dalam kesempatan ekonomi bagi penduduknya.

Selain masalah lapangan pekerjaan, daerah-daerah pinggiran yang minim sentuhan pembangunan juga menjadi poin krusial dalam

memahami lanskap kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Daerah-daerah ini seringkali minim akan akses layanan dasar seperti



pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang mumpuni. Kondisi ini menjadi faktor penting yang memperparah tingkat kemiskinan di wilayah ini. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar antara daerah yang terhubung dan yang terpinggirkan menjadi tantangan yang signifikan bagi upaya peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Jeneponto.

Permasalahan kemiskinan tidak lagi sekadar menjadi sorotan pada skala nasional, namun telah menjalar sebagai persoalan mendesak yang menghampiri setiap bagian dari bumi pertiwi, Indonesia. Kondisi ini tidak lagi terpaku pada ranah kebijakan nasional semata, melainkan juga telah mencengkeram dalam jangkauan wilayah hingga tingkat terkecil di setiap provinsi, kabupaten, dan kota di negeri ini. Dampaknya terasa mendalam dan tersebar luas, mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Dalam konteks ekonomi, Kabupaten Jeneponto menghadapi tantangan signifikan terkait pertumbuhan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan pertumbuhan populasi. Sementara sektor pertanian dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah ini, perkembangan sektor industri dan jasa masih terbilang terbatas. Keterbatasan ini menjadi faktor utama yang berkontribusi ada minimnya kesempatan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Selain itu, kurangnya



diversifikasi ekonomi juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi global.

Akses yang terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas tadi kemudian memperburuk ketimpangan sosial serta menghambat akses penduduk lokal untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja. Di samping itu, infrastruktur yang belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar.

Mengatasi masalah-masalah tersebut memerlukan strategi yang holistik, yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memperhatikan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang beragam, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu contoh dari dampak yang terasa akibat masalah kemiskinan yang belum tuntas. Di tengah kemajuan dan perubahan yang terjadi di sejumlah wilayah, tingkat kemiskinan yang tetap tinggi di Jeneponto menjadi sorotan penting. Hal ini tercermin jelas melalui data resmi terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyoroti tingginya angka kemiskinan di kabupaten tersebut. Dinamika kompleks kemiskinan ini memerlukan pemahaman mendalam serta upaya



bersama dari berbagai pihak untuk menjembatani kesenjangan dan membangun solusi yang berkelanjutan.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merambak dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga memengaruhi strata kabupaten dan kota di seluruh negeri. Kabupaten Jeneponto, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Data terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus memperlihatkan situasi ini, sebagaimana yang tercermin pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.1 Prsentase penduduk miskin (p0) menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (persen), 2020-2022¹

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen)		
	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	12.48	12.45	12.24
Bulukumba	7.10	7.43	7.39
Bantaeng	8.95	9.41	9.07
Jeneponto	14.58	14.28	13.73
Takalar	8.44	8.25	8.25
Gowa	7.38	7.54	7.36
Sinjai	9.00	8.84	8.80
Maros	9.74	9.57	9.43
Pangkep	13.96	14.28	13.92
Barru	8.26	8.68	8.40
Bone	10.68	10.52	10.58
Soppeng	7.59	7.53	7.49
	6.95	6.46	6.57
	5.05	5.04	5.11



_____ vinsi Sulawesi Selatan. <http://sulsel.bps.go.id>.

Pinrang	8.86	8.81	8.79
Enrekang	12.17	12.47	12.39
Luwu	12.65	12.53	12.49
Tana Toraja	12.10	12.27	12.18
Luwu Utara	13.41	13.59	13.22
Luwu Timur	6.85	6.94	6.81
Toraja Utara	12.01	11.99	11.65
Makassar	4.54	4.82	4.58
Pare Pare	5.44	5.40	5.41
Jeneponto	7.85	8.14	7.78
SULAWESI SELATAN	8.72	8.78	8.63

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 50,59 ribu jiwa, dengan presentase kemiskinan mencapai 13,73 persen, meskipun begitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto cenderung mengalami penurunan hal ini bisa dilihat dari data BPS hasil analisis Presentasi Penduduk Miskin (P0) Menurut Kota/Kabupaten se-Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022. Dari data tersebut dapat kita lihat progres Penanggulangan kemiskinan dari tahun 2010 hingga 2022 di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2010 data persentase penduduk miskin Kabupaten Jeneponto berada pada angka 19,09 persen dan tahun 2023 tersisa 13,73. Penurunan persentase penduduk miskin Jeneponto dari tahun 2010 hingga 2021 mencapai 5,36 persen. Terlepas dari hal itu, kita tidak bisa



Provinsi Sulawesi Selatan. <http://sulsel.bps.go.id>.

berpaling dari fakta dan data yang ada bahwa Kabupaten Jeneponto masih merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan per-Tahun 2023.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Jeneponto perlu untuk terus mengupayakan program terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dengan itu Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan daerah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Tujuan ditetapkannya perda ini adalah untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.



Beberapa poin penting yang diatur dalam Perda ini antara lain konsep penanggulangan kemiskinan berbasis pemenuhan hak dasar

dan pemberdayaan masyarakat miskin, kewajiban pemerintah daerah dan hak warga miskin, strategi penanggulangan kemiskinan, serta pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Asas penanggulangan kemiskinan dalam Perda ini mencakup asas kemanusiaan, kesejahteraan, partisipatif, pemberdayaan, transparansi, akuntabilitas, sinergi, terukur, keadilan dan keberlanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan program-program penanggulangan kemiskinan benar-benar efektif menjangkau dan memberdayakan warga miskin di Kabupaten Jeneponto.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang digariskan meliputi pendataan akurat warga miskin, pengurangan beban pengeluaran warga miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin, pengembangan UMKM, serta sinergi kebijakan dan program lintas sektor. Sedangkan program-programnya terdiri dari program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi serta program penunjang lainnya.

Berdasarkan uraian data dan fakta di atas, upaya pengetasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan sebagai langkah penting dalam mengatasi masalah sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran



pemerintah daerah dalam Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto dengan melihat, menganalisis dan mengobservasi langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jeneponto dan bagaimana dampak dari langkah-langkah tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Inilah yang mendorong peneliti pada akhirnya mengangkat judul : **“Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto?



ujian Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu,

- a) Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas strategi Penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman akar masalah kemiskinan, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang akar masalah kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, termasuk faktor-faktor yang berperan dalam mempertahankan kemiskinan. Ini memberikan kontribusi teoritis terhadap penelitian tentang kemiskinan dan Penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Dan diharapkan temuan dari penelitian ini dapat berpotensi membantu dalam pengembangan teori-teori terkait strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan, yang dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas.



2. Manfaat Metodologis

Secara metodologis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan masukan dalam mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis atau melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terkait peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan kemiskinan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seberapa besar tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan kemiskinan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi *stakeholder* terkait dalam memahami permasalahan-permasalahan terkait dengan kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah Daerah

2.1.1. Definisi Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.³

Menurut Abu Ahmadi (2007:6) peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2012 :212) peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut menjalankan suatu peran. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena yang



³ Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 123.

satu tergantung pada yang lain dan begitupun sebaliknya. Setiap orang mempunyai peranan yang bermacam-macam yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Menurut Soekanto (2012 : 213) Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dan organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peran mencakup tiga hal :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Untuk dapat lebih memahami mengenai apa itu peran, maka kita dapat merujuk pada pendapat dari beberapa ahli dibawah ini:

1. Menurut Suhardono (1994 : 15)

Pengertian peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.

Menurut Soekanto (2009: 212-213)



Menurut , arti peran ini ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya itu disesuaikan dengan peran yang berbeda. peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
- b) Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c) Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

3. Menurut Riyadi (2002:138)

Pengertian peran merupakan sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk disebabkan karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal tersebut di dasari pada individu dan juga alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.



4. Wolfman(1992:10)

Peran diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Arti peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan.

5. Dougherty & Pritchard (dalam Bauer, 2003: 55)

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

6. Sutarto (2009:138-139)

Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.



Berdasarkan pengertian-pengertian dari beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang atau sekelompok orang apabila ia melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

2.1.2. Konsep Pemerintah Daerah

Konsep pemerintahan daerah merupakan penerjemahan konsep sistem pemerintahan *local government* yang pada intinya memiliki tiga pengertian, yaitu: pertama pemerintah lokal, kedua berarti kegiatan yang dilakukan pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal.⁴

Dalam ketiga pengertian pemerintah daerah memiliki beberapa pengertian. Pada pengertian pertama, Pemerintah lokal lebih menunjuk kepada Organisasi/ Badan/ Lembaga yang berfungsi menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah lokal atau pemerintah daerah menitik beratkan kepada organisasi yang memimpin dan pelaksanaan kegiatan suatu pemerintahan daerah. Pengertian tersebut dalam konteks pemerintahan di Indonesia lebih menunjuk kepada Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang lebih



urcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Widiasarana Indonesia halaman 24

dikenal dengan eksekutif. Kedua lembaga ini yang menggerakkan kegiatan pemerintahan daerah sehari-hari. Kedua lembaga tersebut lebih dimaknai sebagai Pemerintah Daerah (*local government* atau *local authority*)⁵

Pemerintahan lokal pada pengertian kedua merujuk kepada suatu kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif yang dalam sistem pemerintahan Indonesia merujuk kepada Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melakukan kegiatan-kegiatan pengaturan. Kegiatan ini merupakan fungsi penting yang pada hakikatnya merupakan fungsi untuk pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang dijadikan dasar atau arah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal tersebut sama dengan fungsi pemerintah pusat yang meliputi fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Hanif menyebutkan pemerintahan daerah (*local government*) hanya melaksanakan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif sedangkan fungsi yudikatif tetap ditangani pemerintah pusat.



Ircholis. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Widiarjana Indonesia halaman 24

Fungsi atau peran legislatif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan suatu fungsi dari pembuatan kebijakan pemerintahan daerah. Jadi bukan fungsi legislatif seperti halnya fungsi parlemen, di mana dalam konteks Indonesia fungsi ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintahan lokal pada pengertian ketiga lebih menunjuk pada wilayah pemerintahan atau daerah otonom. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah daerah otonom adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Hak mengatur ini diwujudkan dengan pembuatan peraturan daerah yang pada intinya kebijakan umum pemerintahan daerah dari daerah otonom tersebut, sedang hak untuk mengurus rumah tangga daerah diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.⁶

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen tercantum bahwa :“ Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik “. Pasal 4 ayat(1) Undang-



Archolis. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah. Jakarta: Widiasarana Indonesia halaman 30

Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen menyebutkan : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Hasil Amandemen mengemukakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, dapat dikatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menerapkan pembagian secara vertikal atau dengan rumusan lain dapat disimpulkan terdapat pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.⁷

Pemerintah daerah, juga dikenal sebagai pemerintah lokal atau pemerintah daerah otonom, dimana pemerintah daerah merupakan entitas pemerintahan yang bertanggung jawab atas administrasi dan penyelenggaraan layanan publik di tingkat lokal, seperti kabupaten atau kota. Pemerintah daerah memiliki wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau konstitusi nasional untuk mengatur urusan lokal dan mengambil keputusan



7. Fadlan Fauzan. *Hukum Pemerintahan Daerah kajian tentang Hubungan antara pusat dan daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm 36

yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah sering kali diatur oleh undang-undang dan peraturan lokal yang menentukan struktur organisasinya, wewenangnya, dan cara melaksanakan tugas-tugasnya.

Fungsi Pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai pelaksanaan, pengaturan, dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, fungsi Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi tiga aspek utama:

1. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
2. Mereka memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan otonomi, kecuali untuk urusan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Selama melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pemerintah pusat dalam hal wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.



Dalam praktiknya, pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat daerah sangat terkait dengan tiga prinsip pemerintahan

negara, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 8, 9, dan 11) sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah proses penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan prinsip otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai perwakilannya, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Widarta (2005) juga mengemukakan bahwa pemerintah daerah melibatkan lembaga pemerintah daerah seperti Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam



melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas otonomi daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, serta mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Pelayanan Publik: Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan sejumlah layanan publik esensial seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan pengangkutan lokal.
2. Pengaturan dan Perizinan: Mereka mengatur dan memberikan izin untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah mereka, termasuk izin bisnis, perizinan bangunan, dan lain sebagainya.
3. Pengelolaan Sumber Daya Lokal: Pemerintah daerah memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan kebijakan tata ruang di wilayah mereka.
4. Kesejahteraan Sosial: Mereka sering mengelola program-program kesejahteraan sosial, seperti program bantuan sosial, perumahan sosial, dan program-program yang bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat lokal.



5. Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan: Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban dan keamanan di wilayah mereka melalui kepolisian lokal dan badan penegak hukum lainnya.

Pemerintah daerah juga dapat memiliki beragam tingkat otonomi, yang berarti tingkat wewenang dan kendali yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas urusan lokal mereka. Otonomi ini bisa sangat beragam, tergantung pada undang-undang dan konstitusi negara. Otonomi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk otonomi fiskal (kemampuan untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan lokal), otonomi kebijakan (kemampuan untuk membuat peraturan dan kebijakan lokal), dan otonomi administratif (kemampuan untuk mengelola organisasi dan personel mereka sendiri).

Peran pemerintah daerah dan tingkat otonomi mereka dapat bervariasi antara negara dan wilayah. Beberapa negara memberikan pemerintah daerah otonomi yang lebih besar, sementara yang lain mungkin memiliki kendali lebih sentralisasi. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dapat sangat bervariasi, tergantung pada kebijakan yang diadopsi dan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membawa pemerintahan yang lebih



dekat dengan warga dan memenuhi kebutuhan mereka di tingkat lokal. Otonomi lokal dan kemampuan untuk merespons permasalahan dan peluang unik di wilayah mereka adalah aspek kunci dari demokrasi yang kuat.

Pemerintah daerah merupakan pemeran utama dalam penyediaan layanan publik, merumuskan kebijakan, dan mengelola sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah mereka. Maka dari itu pemerintah daerah merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan suatu negara dan memungkinkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, yang diperlukan untuk menjawab masalah dan tantangan yang beragam di tingkat lokal.

2.1.3. Peran Pemerintah Daerah

Secara umum, peran pemerintah adalah hubungan antara pemerintah dan warga yang diperintah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Talidzu Ndraha (2011), yang menggambarkan peran pemerintah sebagai proses memenuhi kebutuhan warga yang tidak dapat diprivatisasi dan pemberian layanan publik ketika diperlukan. Ini melibatkan hubungan transaksional antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk, konsumen



memilih sesuai kebutuhan mereka, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi janji-janji tersebut.

Menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988:18), peran pemerintah dapat dijelaskan dalam tiga bentuk berikut:

1. Awalnya, peran pemerintah adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan, bahkan seringkali fungsi pengumpulan pajak tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Ini adalah peran pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian muncul konsep Negara Pelayanan (Service State), di mana peran pemerintah adalah menjadi abdi sosial yang mengatur kebutuhan yang perlu diatur dalam masyarakat. Konsep ini juga didasari oleh ide Welfare State atau negara kesejahteraan.
3. Namun, ada juga pendekatan di mana pemerintah berperan sebagai entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha dalam pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi "agen pembangunan" yang mendorong inovasi dan pembangunan.

Lebih lanjut, Menurut Tjokroamidjojo (1988:19), peranan pemerintah dalam perkembangan kegiatan masyarakat dapat dilakukan dengan lima cara:

1. Operasi langsung: Pemerintah secara aktif menjalankan kegiatan tertentu.



2. Pengendalian langsung: Pemerintah mengatur dan mengawasi kegiatan melalui perizinan, lisensi, dan alokasi.
3. Pengendalian tak langsung: Pemerintah memberikan pengaturan dan syarat, misalnya dalam penggunaan dana devisa untuk tujuan tertentu.
4. Pengaruh langsung: Pemerintah melakukan persuasi dan nasehat kepada kelompok masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dalam program tertentu.
5. Pengaruh tak langsung: Pemerintah memberikan informasi, menjelaskan kebijakan, dan memberikan contoh tentang efisiensi dan ketidakborosan.

Disisi lain Menurut Sondang P. Siagian (Administrasi Pembangunan, 2009:132), peranan pemerintah umumnya melibatkan fungsi pengaturan, perumusan kebijakan, pelayanan, penegakan hukum, serta pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Peran pemerintah juga penting dalam menciptakan keamanan dasar, mendukung urusan keagamaan dan kepercayaan, mengatur ekonomi, dan memastikan keamanan dalam kehidupan sosial (Nyoman Sumaryadi, 2010:21)

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin



dikehendaki, hal ini sejalan dengan Talidzu Ndraha (2011) yang berpendapat bahwa peranan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat diperlukan sehingga menimbulkan hubungan transaksional seperti sebagai berikut:

- a) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, setiap pilihan berisi janji.
- b) Setiap warga masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya. Kebebasannya itu dilindungi dan dijamin melalui civil service.
- c) Jika konsumen telah menjatuhkan pilihan diantara produk yang ditawarkan, maka produsen/penjual (pemerintah) harus menepati janjinya kepada konsumen (masyarakat)
- d) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, konsumen melakukan kontrol sosial terhadap produk yang diterimanya.
- e) Jika janji ternyata ditepati, hal itu berarti produsen (pemerintah) bertanggung jawab jika tidak produsen harus bertanggung jawab.
- f) Jika produsen (pemerintah) bertanggung jawab, dalam hal konsumen (masyarakat) tumbuh kepercayaan terhadap janji produsen (pemerintah).



2.2. Penanggulangan Kemiskinan

2.2.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata “miskin” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)⁸. Kemiskinan memiliki arti hal miskin; keadaan miskin; situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Kemiskinan memiliki arti bahwa orang tidak menguasai sarana-sarana fisik secukupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, untuk mencapai tingkat minimum kehidupan yang masih dapat dinilai manusiawi.⁹

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional yang telah lama menjadi fokus perhatian para peneliti, pemerintah, dan organisasi internasional. Dalam pemahaman modern, kemiskinan bukan sekadar masalah kekurangan uang atau sumber daya ekonomi semata, meskipun ini masih menjadi aspek penting dari definisinya. Konsep kemiskinan

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Pustaka Utama, 2008), 921.

agnis-Suseno, “Keadilan dan Analisis Sosial: Segi-segi Etis”, dalam *in dan Pembebasan*, ed. J.B Banawiratma (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 37.



telah berkembang dari sekadar ketiadaan sumber daya ekonomi menjadi sesuatu yang lebih luas dan kompleks.

Kemiskinan merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam penelitian sosial dan ekonomi. Ini merujuk pada keadaan di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Kemiskinan dapat diukur dan didefinisikan dalam berbagai cara, dan para ahli telah lama berdebat tentang konsep dan pengukuran kemiskinan. Dalam bukunya, "*Poverty: A Study of Town Life*," Rowntree (1901) memberikan salah satu definisi awal kemiskinan:

*"Poverty, in all the towns we have investigated, means insufficient income to obtain the bare essentials of a healthy life. These essentials may be grouped under three main heads: (1) A sufficiency of food, which means food of the right kind and prepared under proper conditions; (2) A sufficiency of clothing; (3) A sufficiency of housing."*¹⁰

Dalam definisi tersebut, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Namun, sejak itu, konsep kemiskinan telah berkembang dan melibatkan lebih banyak aspek, termasuk akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lebih banyak faktor yang memengaruhi kualitas hidup seseorang.



¹⁰ See, Benjamin Seebohm. *Poverty: A study of town life*. Macmillan, 1902.

Sedangkan Amartya Sen (1999), seorang ekonom terkenal, berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang kemiskinan dengan menciptakan konsep "kemiskinan dalam kapabilitas" (*poverty in capabilities*). Ia mengatakan:

*"Poverty is not just a lack of money; it is not having the capability to realize one's full potential as a human being."*¹¹

Dalam pandangan Sen, kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam masyarakat. Lazimnya konsep kemiskinan juga sering dibagi menjadi dua kategori utama: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada tingkat kekurangan yang didefinisikan sebagai batas minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Ini sering diukur dalam nilai moneter, seperti garis kemiskinan.

Di sisi lain, kemiskinan relatif berkaitan dengan posisi relatif individu atau kelompok dalam masyarakat. Orshansky (1965) memberikan kontribusi penting dalam pengukuran kemiskinan dengan mengembangkan konsep "batas kemiskinan relatif".



(2014). Development as freedom (1999). *The globalization and development perspectives on development and global change*, 525.

"The poverty threshold represents the point below which a family's income is insufficient to support a specified standard of living."¹²

Dalam hal ini, konsep kemiskinan relatif menekankan perbandingan dengan masyarakat di sekitarnya dan menyoroti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Dalam berbagai literatur lain, kemiskinan juga sering dikaitkan dengan berbagai faktor penyebabnya, termasuk pengangguran, ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, memahami dan mengukur kemiskinan adalah langkah penting dalam upaya untuk mengatasi masalah ini dan mengembangkan kebijakan yang efektif.

Dalam banyak konteks, kemiskinan sering didefinisikan sebagai "kekurangan" atau "ketiadaan," tetapi ini adalah definisi yang terlalu sempit. Menurut Amartya Sen, seorang ekonom dan pemikir terkenal, kemiskinan bukan hanya masalah kurangnya uang, tetapi lebih kepada "kemiskinan dalam kapabilitas" (*poverty in capabilities*). Ia berpendapat bahwa kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mewujudkan potensi mereka sebagai manusia. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek materi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, tetapi juga dengan akses terhadap



sky, M. (1963). Children of the Poor. *Soc. Sec. Bull.*, 26, 3.

pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah multidimensional yang melibatkan banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengatasi kemiskinan dengan benar, perlu dipertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk mengatasi kemiskinan. Ini mencakup masalah kesehatan, pendidikan, kesempatan pekerjaan, akses ke layanan dasar, hak asasi manusia, dan ketidaksetaraan.

Lebih lanjut, dalam literatur lain tentang kemiskinan, kita akan sering menemui perbedaan antara kemiskinan absolut dan relatif. Seperti yang dijeskan tadi, kemiskinan absolut memiliki konsep yang berkaitan dengan tingkat kekurangan yang didefinisikan sebagai batas minimum yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Ini sering diukur dalam nilai moneter, seperti garis kemiskinan, yang merupakan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Di sisi lain, kemiskinan relatif digambarkan dengan posisi relatif individu atau kelompok dalam masyarakat. Ini berarti bahwa seseorang dianggap miskin jika ia memiliki lebih sedikit sumber daya atau kesempatan dibandingkan dengan mayoritas masyarakat



di sekitarnya. Ini menyoroti masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Selain itu, terdapat juga yang disebut sebagai kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem merupakan fenomena global yang terus menjadi fokus perhatian dunia. Didefinisikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, yang ditentukan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, kemiskinan ekstrem melibatkan tingkat penghasilan yang sangat rendah, membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pengukuran kemiskinan ekstrem sering menggunakan parameter pendapatan harian, seperti standar Bank Dunia sebesar US\$1.90 per hari. Penyebab kemiskinan ekstrem melibatkan sejumlah faktor kompleks, termasuk kurangnya akses ke pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan krisis ekonomi atau konflik. Dampaknya melibatkan aspek kesehatan, pendidikan, dan nutrisi, mengakibatkan lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan.

Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melibatkan berbagai program, seperti program bantuan sosial dan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan. Peran komunitas internasional juga menjadi krusial dalam mendukung negara-negara yang berjuang mengatasi kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, konflik bersenjata, dan perubahan iklim seringkali menjadi



hambatan dalam implementasi program-program tersebut. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi yang cermat serta kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai akar permasalahan dan dukungan yang berkesinambungan, masyarakat global dapat bersama-sama mengurangi dampak kemiskinan ekstrem dan mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi semua.

Sebagai akibat dari berbagai konsep ini, pengukuran dan pemahaman kemiskinan telah menjadi lebih kompleks. Selain itu, berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah telah bekerja keras untuk mengembangkan metode yang lebih baik untuk mengukur dan memahami kemiskinan, termasuk penggunaan indikator sosial, ekonomi, dan kualitas hidup.

Penting untuk diingat bahwa konsep kemiskinan bersifat kontekstual dan dapat bervariasi dari pada setiap negara atau daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi dan memahami kemiskinan di suatu wilayah atau komunitas, perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berperan dalam menciptakan dan mempertahankan kemiskinan pada wilayah tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang konsep kemiskinan menjadi kunci dalam



upaya mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2.2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat bervariasi di berbagai negara dan masyarakat, namun ada beberapa faktor umum yang dapat diidentifikasi sebagai pemicu utama kemiskinan. Dalam essay ini, kita akan membahas beberapa penyebab utama kemiskinan.

Salah satu penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya akses pendidikan. Individu yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas cenderung memiliki keterampilan yang terbatas dan kesempatan pekerjaan yang terbatas. Pendidikan yang buruk atau kurangnya infrastruktur pendidikan dapat menciptakan lingkaran kemiskinan, di mana generasi berikutnya juga mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan.

Selain itu, kesenjangan gender juga dapat menjadi penyebab utama kemiskinan. Wanita seringkali menghadapi diskriminasi dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kontrol atas sumber daya. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat potensi ekonomi penuh wanita, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dalam komunitas tersebut.



Krisis ekonomi dan ketidakstabilan makroekonomi juga dapat menjadi faktor yang signifikan dalam menyebabkan kemiskinan.

Fluktuasi ekonomi, kebijakan yang tidak tepat, atau krisis keuangan dapat mengakibatkan pengangguran, inflasi, dan penurunan daya beli, yang semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Pertanian yang tidak produktif dan kurangnya akses terhadap lahan yang subur juga dapat menyebabkan kemiskinan di daerah pedesaan. Keterbatasan dalam teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan perubahan iklim dapat membuat komunitas agraris lebih rentan terhadap kemiskinan.

Penting juga untuk menyadari bahwa konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik dapat menjadi penyebab serius kemiskinan. Konflik bersenjata dapat menghancurkan infrastruktur, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memaksa orang untuk menjadi pengungsi, semuanya dapat merugikan masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Dalam mengatasi kemiskinan, pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pemberdayaan perempuan, pembangunan ekonomi, dan penanganan ketidaksetaraan serta konflik diperlukan. Upaya bersama dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat membantu menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi penyebab-penyebab kemiskinan ini,



dan pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3. Indikator indikator Kemiskinan

Bank Dunia menyatakan, indikator utama kemiskinan adalah terbatasnya kepemilikan tanah dan modal, terbatasnya sarana dan prasarana standar, perbedaan kesempatan kerja, perbedaan layanan kesehatan yang layak, perbedaan kesempatan kerja yang layak, perbedaan kualitas sumberdaya manusia, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk (bad governance) dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan, tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan (environmental sustainable). Garis kemiskinan yang dipakai Bank Dunia adalah pendapatan penduduk rata-rata 1 dolar AS bentuk satuan PPP per kapita per hari (Deaton,2005). Sedangkan negara maju, seperti Eropa menetapkan 1/3 dari nilai PDP per tahun sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan menurut Bank Dunia adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari. Pada konteks internasional, dimensi kemiskinan diukur dari Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index (HDI) yang merupakan akumulasi dari indeks usia harapan hidup, indeks



pendidikan, dan indeks perkapita. Dengan cara menghitung indikator kemiskinan sebagai berikut:

- a. Membandingkan jenis kemiskinan dunia dari beberapa negara
- b. Menggunakan garis kemiskinan untuk menghitung jumlah kemiskinan di dalam negara
- c. Menggunakan estimasi kemiskinan dan menyesuaikannya dengan melihat langsung pengalaman dari kaum miskin.

Garis kemiskinan di Indonesia didekati dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan barang-barang lainnya). Biaya untuk membeli 2.100 kalori per hari disebut Garis Kemiskinan Makanan, sedang biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan disebut Garis Kemiskinan Non Makanan. Jadi, kemiskinan menurut kriteria BPS adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari (Johanes Lubis, 2004). Penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Standar yang digunakan Biro Pusat Statistik ini dinamis setiap tahun, karena tingkat harga barang terus berubah setiap tahun, terjadinya pola konsumsi, dan meluasnya cakupan komoditas yang harus diperhitungkan. Menurut



kajian terakhir yang dilakukan *World Bank* (2006), garis kemiskinan nasional ini setara dengan pendapatan penduduk sebesar 1,55 dolar AS per hari.

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun nonpangan. BPS menghitung angka kemiskinan melalui tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini kemiskinan di definisikan sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *head count index (HCI)*, yaitu jumlah presentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan diperoleh dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan nonpangan. Kebutuhan minimum pangan ditetapkan 2.100 kkal/kapita/hari seperti yang di anjurkan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 1988. Sedangkan pengeluaran minimum untuk perumahan, bbm, sandang, pendidikan, kesehata, dan transportasi merupakan kebutuhan minimum nonpangan yang harus dipenuhi(Pudjirahaju 399).



2.2.4. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan bukanlah sekadar sebuah tugas, melainkan sebuah perjuangan yang membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Di tengah kompleksitas tantangan kemiskinan, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting sebagai garda terdepan dalam mengemban tanggung jawab sosialnya terhadap warganya. Pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam upaya mengurangi kemiskinan dan menciptakan perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan keterlibatan dan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan secara terperinci mengenai peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dengan 3 dimensi peran, yaitu:

a. Regulator:

Sebagai regulator, pemerintah daerah memiliki peran dalam membuat dan menegakkan kebijakan yang berkaitan dengan kemiskinan. Hal ini mencakup penetapan regulasi terkait upah minimum, perlindungan pekerja, dan kebijakan kesejahteraan sosial. Dengan menjadi regulator yang efektif, pemerintah daerah dapat



menciptakan kerangka kerja yang adil dan melindungi hak-hak masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

b. Dinamisator:

Pemerintah daerah berperan sebagai dinamisator dalam menggerakkan berbagai inisiatif dan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini mencakup pengembangan proyek-proyek ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, dan promosi usaha kecil. Dengan menjadi dinamisator, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

c. Fasilitator:

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah berperan dalam mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Fasilitasi juga melibatkan pengelolaan program-program bantuan yang efisien dan transparan. Dengan menjadi fasilitator yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa bantuan dan layanan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata.

Melalui peran-regulator, dinamisator dan fasilitator ini, pemerintah daerah dapat menjadi motor penggerak utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan, mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.



2.2.5. Definisi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu konsep dan tujuan yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi sebuah negara. Konsep ini melibatkan upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat. Penanggulangan kemiskinan biasanya melibatkan berbagai tindakan, program, dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan komunitas yang berada dalam kondisi kemiskinan.

Salah satu definisi yang terkenal mengenai Penanggulangan kemiskinan berasal dari PBB, yang menggambarkannya sebagai "upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan akhirnya menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat." Definisi ini menekankan pada upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara individu dan kelompok yang miskin dan yang lebih mampu.

Peneliti ekonomi terkenal seperti Jeffrey Sachs juga telah berbicara tentang Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan:

"Sustainable development is not possible in the presence of extreme poverty. We all have a moral duty to remove this blight from humanity."¹³

I. H. (2007). *Sustainable development at risk: Ignoring the past*. IDRC.



Penanggulangan kemiskinan seringkali memerlukan tindakan dan kebijakan yang komprehensif, termasuk investasi dalam pendidikan, perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan penciptaan peluang kerja. Selain itu, konsep Penanggulangan kemiskinan juga mencakup aspek perlindungan sosial yang bertujuan untuk melindungi individu dan keluarga dari kemungkinan jatuh dalam kemiskinan atau untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan jika mereka sudah berada dalam kondisi tersebut.

Penting untuk mencatat bahwa Penanggulangan kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multi-dimensi. Upaya ini seringkali memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, strategi Penanggulangan kemiskinan juga dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, karena kondisi sosial, ekonomi, dan budaya berbeda-beda di berbagai tempat.

Pentingnya Penanggulangan kemiskinan juga tercermin dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-1 yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan:



*"By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than \$1.25 a day."*¹⁴

Dalam konteks Penanggulangan kemiskinan, ada banyak teori dan pendekatan yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi, sosiolog, dan ilmu sosial lainnya. Selain itu, banyak penelitian dan studi empiris juga telah dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan efektivitas berbagai program Penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan melibatkan beberapa aspek kunci yang perlu dipahami dan diperhatikan, diantaranya:

1. Pendekatan Multi-Dimensi: Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, melainkan juga mengenai akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, akses ke air bersih, sanitasi, dan banyak lagi. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan multi-dimensi dalam mengukur dan mengatasi kemiskinan.
2. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat yang terkena dampak kemiskinan seharusnya menjadi bagian aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program Penanggulangan kemiskinan. Mereka memiliki wawasan yang berharga tentang



vi., & Ortiz-Ospina, E. (2013). Global extreme poverty. *Our world in data*.

tantangan yang mereka hadapi dan solusi yang mungkin berhasil di tingkat komunitas.

3. Keadilan dan Kesetaraan: Penanggulangan kemiskinan juga melibatkan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah prinsip penting dalam mencapai tujuan ini.
4. Perlindungan Sosial: Program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, program pangan, dan jaminan kesehatan, dapat membantu melindungi keluarga yang rentan dari jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan saat mereka menghadapi krisis.
5. Pembangunan Berkelanjutan: Penanggulangan kemiskinan harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup perlindungan lingkungan, pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana.
6. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta: Partisipasi sektor swasta juga dapat berkontribusi pada Penanggulangan kemiskinan melalui investasi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan infrastruktur ekonomi.
7. Evaluasi dan Pembelajaran: Program Penanggulangan kemiskinan harus secara teratur dievaluasi untuk memahami efektivitas mereka. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dapat membantu meningkatkan program di masa depan.



Banyak organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta lembaga-lembaga internasional, berfokus pada Penanggulangan kemiskinan. Mereka mengembangkan strategi, program, dan proyek untuk membantu individu dan komunitas yang miskin untuk mengatasi tantangan mereka dan mencapai kemandirian ekonomi.

Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi "*Poverty is the worst form of violence*" kemiskinan adalah bentuk kekerasan yang paling buruk, hal tersebut mencerminkan betapa pentingnya Penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan masyarakat yang lebih baik. Penanggulangan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, dan tantangan-tantangan yang ada seringkali kompleks dan beragam. Namun, dengan komitmen, kerja sama, dan upaya bersama dari berbagai pihak, pengurangan dan akhirnya penghapusan kemiskinan merupakan tujuan yang dapat dicapai dalam masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Penanggulangan kemiskinan adalah konsep yang mendalam dan sangat penting dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Upaya dalam Penanggulangan kemiskinan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek-aspek sosial, politik, dan budaya yang kompleks.



2.2.6. Teori Penanggulangan Kemiskinan

John Friedmann(1992) memandang Penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang melibatkan berbagai elemen, tidak hanya dari segi kebijakan tetapi juga dari perspektif proses perencanaan yang lebih inklusif. Baginya, strategi Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dianggap sebagai langkah-langkah teknokratis semata, melainkan harus mencerminkan keterlibatan masyarakat secara luas serta responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks.

Friedmann memperjuangkan gagasan bahwa Penanggulangan kemiskinan bukanlah sekadar soal menyusun kebijakan atau merencanakan program, melainkan juga tentang memberdayakan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam merumuskan dan melaksanakan solusi-solusi yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Salah satu pendekatan utamanya adalah dengan mendorong "perencanaan sebagai pembelajaran sosial" di mana pengetahuan dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman praktis dan kolaborasi antara para ahli dan masyarakat.

Friedmann menyoroti pentingnya adanya ruang bagi pengembangan solusi dari bawah ke atas, yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan dinamika



masyarakat yang berjuang melawan kemiskinan. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan finansial atau infrastruktur semata, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya, mengakses pendidikan yang berkualitas, memperoleh akses layanan kesehatan, dan membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. John Friedmann (1992) menggarisbawahi beberapa poin penting dalam upaya Penanggulangan kemiskinan:

1. Partisipasi Masyarakat

Friedmann menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program Penanggulangan kemiskinan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan lokal tetapi juga memperkuat keberlanjutan program-program tersebut.

2. Perencanaan Berbasis Pembelajaran

Pendekatan perencanaan yang dipromosikan Friedmann adalah perencanaan sebagai pembelajaran sosial. Dia mengusulkan bahwa pengetahuan dan kebijaksanaan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan harus tumbuh melalui praktik dan pengalaman lapangan, bukan hanya dari teori atau perencanaan top-down.

Kapasitas dan Pemberdayaan

Upaya Penanggulangan kemiskinan tidak hanya tentang



memberikan bantuan atau sumber daya secara langsung tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat. Ini termasuk memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengelola secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Respon Terhadap Perubahan

Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini mencakup kemampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan konteks yang dinamis seperti perubahan teknologi, kondisi ekonomi global, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang berkesinambungan dan dinamis, yang harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang terus berubah. Strategi Penanggulangan kemiskinan tidak bisa menjadi pendekatan statis; sebaliknya, harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terus berkembang.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep atau teori-teori yang mendukung penelitian dan berfungsi sebagai panduan sistematis dalam merancang penelitian. Kerangka



konseptual memberikan arahan bagi peneliti untuk secara terstruktur menjelaskan teori yang menjadi dasar dalam penelitian.

Dengan merinci konsep-konsep yang relevan, kerangka konseptual membantu menyusun pertanyaan penelitian, merumuskan hipotesis, dan mengidentifikasi variabel yang perlu diukur. Dengan demikian, kerangka konseptual menjadi alat analisis yang kuat dalam membantu peneliti memahami kompleksitas topik penelitian dan merancang pendekatan yang sistematis dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Bagan Kerangka Pikir

